

**ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2018)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh

MUHAMMAD FADLY AKBAR

NPM : 1551010240

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing 1 : Madnasir, S.E., M.S.I

Pembimbing 2 : Suhendar, S.E, M.S.Ak., Akt



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

pendapatan asli daerah (pad) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah jumlah hotel berpengaruh terhadap pad di kabupaten lampung timur? apakah jumlah restoran berpengaruh terhadap pad di kabupaten lampung timur? apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pad di kabupaten lampung timur? apakah jumlah hotel, restoran dan jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pad di kabupaten lampung timur? dan apakah jumlah hotel, restoran dan jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pad di kabupaten lampung timur di tinjau dari ekonomi islam? tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah hotel, restoran dan jumlah wisatawan terhadap pad di kabupaten lampung timur. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu Jumlah hotel berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel jumlah hotel menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari $>0,05$ yaitu 0,202. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Jumlah restoran berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel jumlah restoran menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari $>0,05$ yaitu 0,970. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak. Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel jumlah wisatawan menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari $<0,05$ yaitu 0,049. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Berdasarkan keterangan dan perumusan hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian, dari hasil yang diperoleh melalui analisa secara kuantitatif, menunjukan bahwa dari keempat variabel yang diteliti yaitu tiga variabel independen (jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah wisatawan) dan satu variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) tidak berpengaruh secara simultan karena hal ini ditunjukan dengan uji F yang memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 atau nilai signifikansi $0.071 > 0.05$ dalam pengelolaan hotel, restoran dan wisatawan dalam islam pemerintah harus menggunakan prinsip-prinsip keislaman agar tujuan dari ekonomi Islam seperti tujuan pengembangan, berproduksi dan menambah pemasukan negara, syari' terkait dengan kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam perputaran harta. Dan tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari tujuan diatas, maka perkembangan pariwisata dalam Islam haruslah sesuai dan sejalan dengan syariat Islam yang dapat membuat semua golongan manusia tidak peduli kaya atau miskin menjadi sejahtera bukan hanya di dunia namun juga di akhirat.

Kata Kunci : Pariwisata, Pendapan Asli Daerah



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadly Akbar

NPM : 1551010240

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

***hennu*
Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001**

***SA*
Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt
NIP. 198510302019031004**

Ketua Jurusan

***hennu*
Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI
EKONOMI ISLAM** disusun oleh **Muhammad Fadly Akbar**, NPM:
1551010240, Jurusan **Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada
Hari/Tanggal : **Senin, 16 Desember 2019.**

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang : **Dr. H. Nasrudin, M.Ag**

Penguji 1 : **Any Eliza, S.E., M.Ak**

Penguji 2 : **Madnasir, S.E., M.S.I**

Sekretaris : **Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak**

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Baslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahku tersayang Nazarudin dan Ibuku tercinta Hatati Nurmalia terimakasih ayah ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada ayah ibu.
2. Kakak dan adikku Rina Febriani Eka Putri dan Mercelia Anggia Putri, yang selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Teman-teman Ekonomi Syariah Angkatan 2015.
4. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Fadly Akbar dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 28 Juni 1997, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Nazarudin dan Ibu Hatati Nurmalia. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Lulus Pada Tahun 2008
2. SMPN 3 Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Lulus Tahun 2011
3. SMAN 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Lulus tahun 2014
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah .

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Alloh SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul : **ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2018)**. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak senghajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi dan kritik yang proposional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dar berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak D. Ruslan Abdul Ghofur M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Lampung yang senantiasa tanggap dalam kesulitan mahasiswa.r
2. Bapak Madnasir, S.E, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam sekaligus bimbingan 1 yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Suhendar, S.E., M.S.Ak.,Akt. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Lampung yang telah memberikan motivasi, membimbing, membantu, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Kepada Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur dan Kepada Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur , yang telah membantu memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, kakak, adik, sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2015 yang selama ini menjadi teman yang baik dalam bertukar informasi, berbagai keluh kesah dan keceriaan.
8. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Bandar Lampung, desember 2019

Penulis

Muhammad Fadly Akbar

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Judul skripsi ini **“ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2018) “**

Maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut.

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹
2. **Pengaruh** adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, oranng) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²

¹Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43

²Kementrian Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 147.

3. **Pariwisata** adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.³
4. **Pendapatan Asli Daerah** adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.⁴
5. **Ekonomi Islam** adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Al-quran dan Hadits. Para ulama, khususnya Ahlusunnah wal jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas.⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ditinjau dari ekonomi islam.

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.41.

⁴ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.101

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012), h. 16

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Alasan objektif

Pemerintah kabupaten lampung timur untuk beberapa tahun belakangan ini sedang gencar untuk mempromosikan pariwisata yang ada di kabupaten lampung timur dan juga pemerintah membuka banyak obyek-obyek wisata baru yang cukup menarik perhatian dan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Beberapa pariwisata yang sedang gencar di promosikan contohnya seperti pantai kerang mas, taman nasional way kambas, situs purbakala dan wisata religi seperti situs makam keramat habib husein, dengan adanya beberapa objek pariwisata baru tersebut diharapkan dapat menambah PAD di Kabupaten Lampung Timur.

2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam jurusan ekonomi islam serta tersedianya literature ataupun sumber lain seperti jurnal, artiket dan data yang diperlukan untuk penunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal.⁶ Sesuai dengan adanya peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, kepala pemerintah daerah di berikan hak untuk mendapatkan beberapa sumber keuangan yaitu pertama, kepastian tersedianya dana dari pemerintah sesuai dengan urusan yang diserahkan, kedua, kewenangan memungut dan mendayakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah tersebut dan dana perimbangan lainnya, ketiga hak untuk mengelola kekayaan daerah dan pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.⁷

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat telah membagi berbagai sumber pembiayaan kepada daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dilimpahkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 09 tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁶ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012),h 4

⁷ Bahar, Ujang. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negri Antara Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Pt Indeks, 2009), h137

serta Peraturan Pemerintah Pendukungnya. Menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Dana Perimbangan, (c) Lain-lain Pendapatan.⁸ Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan *akuntable*.

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah di tuntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.⁹ Menurut Nurcholis, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari

⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 2, www.djpk.depkeu.go.id

⁹ Regina Usman, “ *Pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)* “, Jurnal universitas telkom, h.6

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan asli daerah, dan lain-lain yang sah.¹⁰

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, serta penerimaan keuangan di atur oleh daerah. syarat bahwa Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah menunjukan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan Otonomi Daerah.¹¹ Semakin besar kontribusi PAD nya maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.¹²

Menurut Sumitro dalam Nababan dalam ekonomi modern terdapat dua cabang utama teori, yaitu teori harga dan teori pendapatan. Teori pendapatan termasuk dalam ekonomi makro, yaitu teori yang mempelajari hal-hal besar seperti perilaku jutaan rupiah

¹⁰ Safrita, “*Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura*”, Jurnal FEB Universitas Yasip Papua

¹¹ Bayu Pratama Putra, “*Analisis Kontribusi Laba Perusahaan Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015*”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritime Raja Ali Haji, Tanjung Pinang Kep.Riau, 2016, h.3

¹² Abdullah, Dri Asmawanti, dan Febriansyah, “ *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Konerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan*” Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu, Vol3, No.1 , (2015), h.42, <http://jafebunib.ac.id>

pengeluaran konsumen, investasi dunia usaha, dan pembelian yang dilakukan pemerintah.

Di kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten yang mana memiliki potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang besar. Meskipun sudah berlakunya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya kinerja keuangan daerah kota Bandar Lampung belum dapat dikatakan mandiri. Hal ini karena beberapa tahun terakhir penerimaan PAD tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan lain-lain.¹³

Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilakukan setiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan memajukan daerah tersebut. Besarnya pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Realisasi penerimaan dan Target dari Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lampung Timur selama periode 2011 hingga 2018 pada tabel 1.1

¹³ Widi Angga Kurniawan, „Flypaper Effeck Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)“, h.2.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi PAD kabupaten Lampung Timur tahun 2011-2018

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2011	Rp. 29.430.538.632,00	Rp. 31.574.375.338,54
2	2012	Rp. 31.305.286.900,00	Rp. 45.362.536.451,27
3	2013	Rp. 51.111.316.050,00	Rp. 40.476.211.275,34
4	2014	Rp. 86.855.359.390,00	Rp. 83.131.971.570,03
5	2015	Rp. 90.007.172.012,00	Rp. 84.496.936.513,56
6	2016	Rp. 106.785.510.887,00	Rp. 94.924.247.670,30
7	2017	Rp. 215.971.472.400,00	Rp. 207.241.702.799,34
8	2018	Rp. 132.489.811.269,28	Rp. 124.918.254.117,06

Sumber : Bapenda 2019

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2011-2018. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan diharapkan tahun-tahun selanjutnya dapat lebih meningkat supaya kondisi perekonomian Lampung Timur menjadi lebih baik.

PAD merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan usur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, diantaranya adalah: sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan lain-lain¹⁴

¹⁴ Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, dan Stefanus Pani Rengu, “ *Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah* ” (Studi

Salah satu pendapatan pemerintah daerah adalah dari sektor pariwisata. Pariwisata adalah salah satu potensi daerah yang tentu akan menjadi ciri khas suatu daerah, pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Indonesia sangatlah baik, terbukti dengan banyaknya Destinasi Tempat Wisata (DTM) yang dimiliki Indonesia, pariwisata juga menjadi salah satu penambah devisa Negara yang cukup besar. Usaha mengembangkan dunia pariwisata Indonesia ini didukung dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisataan* yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya.¹⁵

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu dari beberapa daerah yang menjadi destinasi wisata di Provinsi Lampung yang memiliki banyak obyek wisata yang perlu dikembangkan guna dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Lampung Timur memiliki beberapa kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah obyek tujuan wisata karena didukung banyaknya hutan lindung dan dataran rendah yang dekat dengan pantai yang diarahkan sebagai kawasan pendukung pariwisata.

Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2 No.2, h.326

¹⁵ Muhammad luthfi, "Pengembangan Pariwisata dan Dampak Sosial Ekonomi di Bandar Lampung", *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol.2 No.1, (Juni, 2013), h.18

Berikut beberapa objek pariwisata yang ada di Lampung Timur tahun 2018 :

Tabel 1.2

Objek Wisata Yang Ada di Lampung Timur

No	Nama objek wisata
1	Balai benih induk
2	Dam swadaya
3	Danau beringin indah
4	Taman nasional way kambas
5	Danau jepara
6	Danau kemuning
7	Pantai kerang mas
8	Wisata hutan mangrove
9	Taman purbakala pugung raharjo
10	Museum budaya
11	Objek wisata dam negara batin
12	Sesat agung
13	Pesanggrahan wa curup
14	Situs lawang kuri

15	Situs makam keramat habib husein
----	----------------------------------

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur

Melihat dari hal tersebut maka bukan tidak mungkin lagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk membuat potensi pariwisatanya dikembangkan dengan mengelolanya menjadi lebih baik sehingga diminati oleh para wisatawan, tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan asing. Selain itu, jika dikembangkan dengan sangat baik maka akan menyumbang banyak bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Timur. Kontribusi pendapatan ini bisa juga berasal dari retribusi tempat wisata, pajak hotel dan penginapan, asrama, villa atau sejenisnya, dan juga dari pajak rumah makan atau restoran.

Berikut beberapa usaha pariwisata yang ada di Lampung Timur tahun 2011-2018 :

Tabel 1.3

Jumlah Hotel dan Restoran

No	Tahun	Jumlah hotel	Jumlah restoran dan rumah makan
1	2011	50	53
2	2012	50	92
3	2013	54	95
4	2014	54	98

5	2015	57	99
6	2016	55	93
7	2017	57	95
8	2018	79	95

Sumber : *Bapenda Lampung Timur*

Hotel dan restoran adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan. Pembangunan pariwisata dilampung timur selama ini telah memberikan hasil yang terus meningkat hal tersebut dilihat dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang untuk menginap dihotel.

Menurut sulistiyono hotel adalah suatu jasa pelayanan yang rumit pengelolaannya, dengan menyediakan berbagai fasilitas yang bisa d pergunakan oleh tamunya selama 24 jam. Usaha perhotelan bisa menunjang kegiatan para wisatawan dalam melakukan suatu perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata dan membutuhkan watu untuk tmpat menginap, makan dan minum serta tempat hiburan. Jika kebutuhan hotel terus meningkat, maka bisa dipastikan pertumbuhan jumlah hotel di Lampung Timur dipastikan akan dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah.

Menurut Austriana tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar yang terjual, jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Para wisatawan akan merasa lebih aman, nyaman, dan betah untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan penginapan akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan itu menginap lebih lama

Berikut adalah jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Lampung Timur tahun dari tahun 2011-2018 :

Tabel 1.4

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lampung Timur

No	Tahun	Wisatawan Domestik	Mancanegara
1	2011	57.758 Wisatawan	390 Wisatawan
2	2012	37.100 Wisatawan	514 Wisatawan
3	2013	47.404 Wisatawan	410 Wisatawan
4	2014	72.034 Wisatawan	600 Wisatawan
5	2015	112.304 Wisatawan	560 Wisatawan
6	2016	288.818 Wisatawan	750 Wisatawan
7	2017	182.000 Wisatawan	422 Wisatawan

8	2018	342.402 Wisatawan	650 Wisatawan
---	------	-------------------	---------------

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur

Menurut Purwanti dan Dewi, R. M., pengaruh jumlah kunjungan wisatawan sangat berarti untuk pengembangan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah sehingga wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung. Adanya dukungan alokasi dana dari pemerintah setiap tahunnya menjadikan sektor pariwisata mengembangkan tempat wisata agar banyak dikunjungi oleh wisatawan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadikan sektor pariwisata berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Akibatnya jumlah kunjungan wisatawan memberikan kontribusi positif dalam pendapatan asli daerah.

Peningkatan realisasi PAD sangat mempengaruhi kondisi keuangan suatu wilayah, apabila penerapan tujuan pembangunan tidak sesuai dengan penerapan pembangunan diakibatkan anggaran PAD yang didapatkan tidak mencukupi dikhawatirkan terjadinya pendistribusian yang tidak merata dimana hal tersebut jelas disebutkan bahwa Islam melarangnya karena munculnya ketidakadilan dalam masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak terealisasinya pembangunan dengan baik. Untuk merealisasikannya jelas bahwa segala sumber daya yang ada dikelola dan diolah secara maksimal dimana hal ini dijelaskan dalam Q.S. Hud ayat 61:

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝۶۱﴾

Artinya : dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh.

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."¹⁶

Dari ayat di atas dijelaskan mengenai “pemakmuran bumi/tanah” dimana terminologi “pemakmur tanah” mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran tanah dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. Barangsiapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran tanah, negara tersebut akan hancur”

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013),h.228

Ini artinya dalam mengoptimalkan Pengelolaan kekayaan daerah, pemerintah harus memperhatikan sumber daya yang ada terutama yang dapat dikelola untuk menjadi sumber pendapatan daerah seperti kekayaan mineral, pertambangan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2018) “

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah peningkatan pendapatan PAD Kabupaten Lampung Timur
2. Subjek penelitian adalah. dinas bapenda dan dinas pariwisata Kabupaten Lampung Timur.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap PAD di Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah restoran terhadap PAD di Kabupaten Lampung Timur ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD di Kabupaten Lampung Timur ?

4. Bagaimana pengaruh jumlah hotel, restoran dan jumlah wisatawan terhadap PAD di Kabupaten Lampung Timur ?
5. Bagaimana pengaruh jumlah hotel, restoran dan jumlah wisatawan terhadap PAD di Kabupaten Lampung Timur di tinjau dari ekonomi islam ?

F. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang ajkan penulis teliti memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap PAD di Kabupaten Lmpung Timur
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah restoran terhadap PAD di Kabupaten Lmpung Timur
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD di Kabupaten Lmpung Timur
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah hotel, restoran dan jumlah wisatawan terhadap PAD di Kabupaten Lampung Timur
- e. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah hotel, restoran dan jumlah wisatawan terhadap PAD di Kabupaten Lampung Timur di tinjau dari ekonomi islam

2. Manfaat penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi islam.
- b. Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kesempatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi tambahan pembendaharaan bacaan, menambah pengetahuan, dan referensi lain yang membutuhkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.¹⁷

Pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

¹⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 51

¹⁸ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2012) h. 101

lain PAD yang sah.¹⁹ Menurut Nurcholis, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan asli daerah, dan lain-lain yang sah.²⁰

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, serta penerimaan keuangan di atur oleh daerah. syarat bahwa Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan Otonomi Daerah.²¹ Semakin besar kontribusi PAD nya maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.²²

Menurut adam smith suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Munculnya spesialisasi akan

¹⁹ Regina Usman, “ *Pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)* “, Jurnal universitas telkom, h.6

²⁰ Safrita, “*Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura*”, Jurnal FEB Universitas Yasip Papua

²¹ Bayu Pratama Putra, “*Analisis Kontribusi Laba Perusahaan Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015*”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritime Raja Ali Haji, Tanjung Pinang Kep.Riau, 2016, h.3

²² Abdullah, Dri Asmawanti, dan Febriansyah, “ *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Konerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan*” Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu, Vol3, No.1 , (2015), h.42, <http://jafebunib.ac.id>

meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi.

Kemudian Aries Djaenuri mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.²³ Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam wilayah sendiri yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu dengan menumbuhkan kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

²³ Aries Djainuri, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, (Bogor: Gailia Indonesia, 2012), h.88.

a. Pajak daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan. Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Dalam buku Darwin tentang jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut²⁴ :

1. Pajak Hotel . Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.
2. Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

²⁴ Drs. Darwin., MBP, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*,(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), h. 119-128

3. Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.
4. Pajak Reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah

b. Retribusi daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui retribusi. Ibnu Syamsi mendefinisikan retribusi sebagai berikut: Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 retribusi dibagi tiga golongan, yaitu²⁵ :

1. Retribusi jasa umum

Jasa yang dimaksud merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

2. Retribusi Jasa Usaha

²⁵ Nining Yuningsih, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Objek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2005, h.13, (On-Line). tersediadi : <http://lib.unnes.ac.id/51311174/.pdf>,

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perijinan tertentu

Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perijinan tertentu dimaksudkan untuk tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Hasil penerimaan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yaitu hasil penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat misalnya antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah (antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro)²⁶

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini di beberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut : Hasil penjualan barang milik daerah; Jasa giro; Sumbangan pihak ketiga; Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah; setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga; denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum; pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.²⁷

B. Pendapatan dalam Islam

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *Public utilities* (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.²⁸

²⁶ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

²⁷ Ahmad yani, *Op.Cit*, h.74

²⁸ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 190

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:

a. Zakat

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Mekkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah pemungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.²⁹ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: 'dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

²⁹ Ibid.,h. 24-25

b. *Kharraj*

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah *kharraj*. *Kharraj* adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *Kharraj* adalah bahwa *Kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan *Zoning*. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *Kharraj* yang berbeda.³⁰ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

³⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.264

c. *Khums*

Para ulama *Syi'i* mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan *Khums* sebesar 20%, sedangkan ulama *Sunni* beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang dimaksud *Khums* ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.³¹ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

Artinya : mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

d. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. *Jizyah* sama dengan *Pull Tax*, karena orang-orang non-muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh

³¹ Nurul Huda dkk, *Op.Cit.*, h. 30

orang Islam. Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29:

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

e. *Ghanimah*

Menurut Sa'id Hawwa, *ghanimah* adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa taut dalam hati kaum musyrikin.

Ghanimah ini merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Dasarnya adalah perintah Allah SWT dalam Q.S Al- Anfal [8]: 41, yang turun di Badar (usai Perang Badar), pada bulan Ramadhan tahun kedua Hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Said bin Zubair dari Ibnu Abbas, dimana pada saat itu para sahabat berselisih tentang pembagian *ghanimah*.³²

³² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 78

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya : ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang[613], Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil[614], jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa[615] yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan[616], Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

f. Ushr

Di kalangan ahli fikih, sepersepuluh (Ushr) memiliki dua arti. *Pertama*, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. *Kedua*, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Yang dimaksud dengan „ushr sebagai sedekah adalah pengertian pertama. Muhammad Sharif Chaundry dalam bukunya *Fundamentals of Islamic Economic System* mengatakan:³³ „Ushr berarti sepersepuluh. Ini merupakan suatu pajak atas hasil pertanian. „Ushr sering digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat, sebab tidak ada garis tegas antara zakat dan „ushr di dalam fiqh. Istilah „ushr tidak ditemukan di dalam Al-Qur‘an, tetapi dua ayat (QS Al-Baqarah [2]: 267 dan QS, Al-An‘am[6]: 141) diambil

³³ *ibid.*, h.99

sebagai acuan dan ayat ini ditujukan kepada penguasa. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ^ر
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ^ع كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ^د
يَوْمَ حَصَادِهِ^ط وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢١٨﴾

Artinya : dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

C. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen-komponennya terdiri dari: “Pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling; “Wis(man)” yang berarti rumah, properti, kampung,

komunitas, dan “ata” berarti pergi terus-terusan, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan rumah (kampong) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan.³⁴

Menurut Kurt Morgenroth, pariwisata dalam arti sempit adalah lalulintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.³⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang melibatkan orang-orang dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan juga memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu yang baru dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah, dan juga dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat yang terdapat pada kawasan pariwisata.

2. Objek dan jenis pariwisata

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya baik alamiah maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan,

³⁴ Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), h.3.

³⁵ I Gede Pitana, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), h.42.

pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya.³⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa : “Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”.³⁷

Unsur yang terkandung dalam pengertian di atas dapat disimpulkan, yaitu:

1. Setiap daya tarik wisata memiliki keunikan, keindahan.
2. Daya tarik dapat berupa alam, budaya, atau hasil karya manusia yang berseni tinggi dan layak untuk dijadikan suatu produk.
3. Yang menjadi sasaran utama adalah wisatawan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek wisata yaitu suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya dimana sumberdaya yang dimaksud adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik

³⁶ Hugo Itamar, *Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja*, Makassar: Universitas Hasanuddin. 2016, h.13, (On Line), tersedia di: <http://journal.unhas.ac.id/index.php/goverment/article/view/1248/>.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisata

untuk dikunjungi wisatawan sehingga terjadi interaksi antara sesama manusia.

Wisata berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu³⁸ :

a. Wisata Alam, yang terdiri dari :

1. Wisata Pantai (*Marine Tourism*), merupakan kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
2. Wisata Etnik (*Etnik Tourism*), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
3. Wisata Cagar Alam (*Ecotourismi*), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat ditempat-tempat lain.
4. Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negri-negri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.

³⁸ Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h, 32-33

5. Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman sekitarnya.

b. Wisata Sosial-Budaya, yang terdiri dari :

1. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat bekas pertempuran (*battle field*) yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.

2. Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan disuatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, maupun dengan tema khusus lainnya.

3. Restoran

Menurut Marsum, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan sebagaimana tercantum dalam definisi Prof.

Vanco Christian dari *School Hotel Administration* di *Cornell University*. Selain bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, membuat puas para konsumennya pun merupakan tujuan operasional restoran yang utama.

Pengertian restoran atau rumah makan menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha Jasa Pangan adalah : “Suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial”. Sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

4. Hotel

Menurut Dinas Pariwisata hotel merupakan suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Dewasa ini pembangunan hotel-hotel berkembang dengan pesat, apakah itu pendirian hotel- hotel baru atau pengadaan kamar- kamar

pada hotel- hotel yang ada. Fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Perhotelan memiliki peran sebagai penggerak pembangunan daerah, perlu dikembangkan secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, PAD, penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha. Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Sehingga mereka akan merasa lebih aman, nyaman dan betah untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata

5. Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan menjunjung tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut. Menurut pandangan psikologi, wisata adalah sebuah sarana memanfaatkan waktu luang untuk menghilangkan tekanan kejiwaan akibat pekerjaan yang melelahkan dan kejenuhan. Adapun ilmu sosiologi menilai

pariwisata sebagai rangkaian hubungan yang dijalin oleh pelancong yang bermukim sementara di suatu tempat dengan penduduk lokal.³⁹

Menurut adam smith suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Munculnya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi.

Krapf Hunziker, seorang pakar pariwisata meyakini bahwa wisata adalah munculnya serangkaian hubungan dari sebuah perjalanan temporal yang dijalin oleh seorang yang bukan penduduk asli. Pariwisata, berdasarkan seluruh definisinya, adalah fenomena yang terus berkembang. Lebih dari itu, industri ini telah menyelamatkan sejumlah negara dari krisis, dan memarakkan pertumbuhan ekonominya.⁴⁰

Berdasarkan teori di atas, dapat dipahami bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana dan prasarana di tempat tersebut. Dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan di daerah tujuan wisata tersebut.

³⁹ M. Liga Suryadana, *Sosiologi Pariwisata: Kajian Kepariwisata dalam Paradigma Interaktif/ Transformatif/ Menuju Wisata Spiritual*, (Bandung: Humaniora, 2015), h. 55.

⁴⁰ *Ibid*, h. 55

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Devilian Fitri (2014) pada skripsi yang berjudul “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pesisir Selatan”. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, sarana akomodasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan, tempat belanja tourist berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah wisatawan, sarana akomodasi dan tempat belanja tourist secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Putu Lia (2013) pada jurnal yang berjudul “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat investasi dan PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam

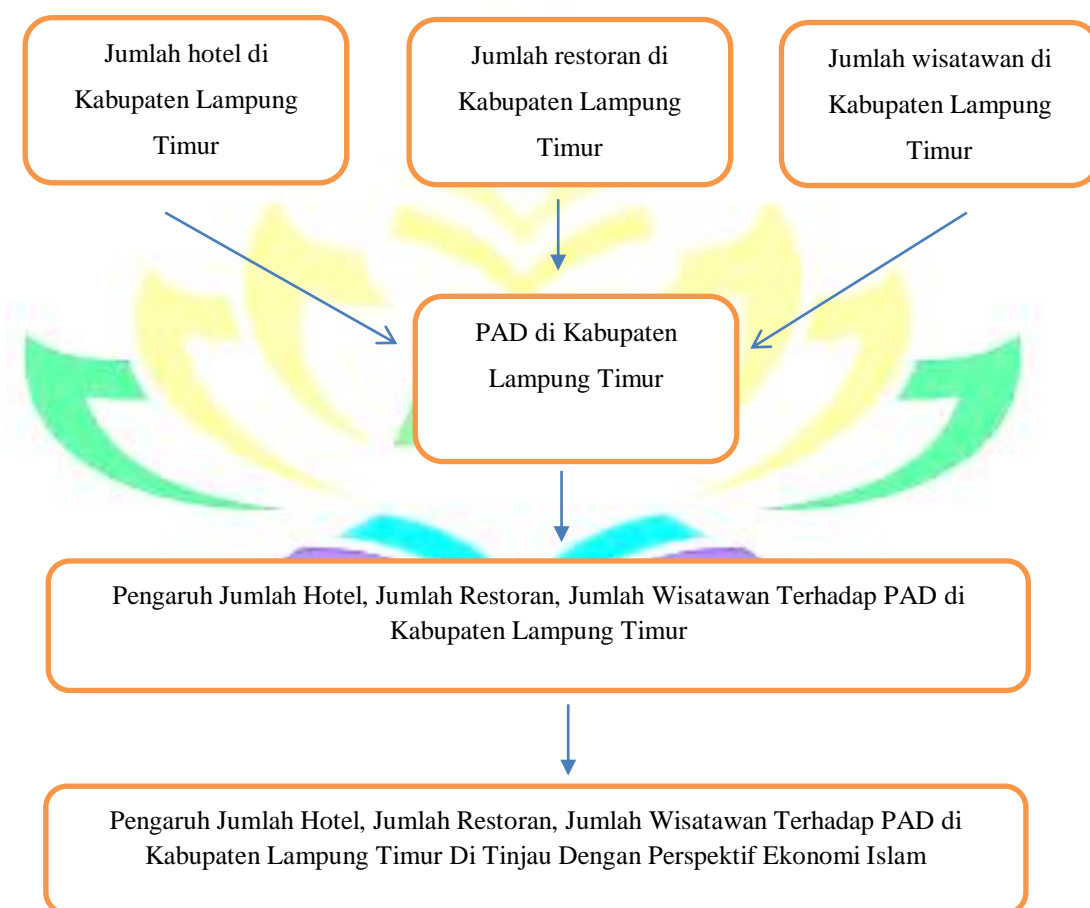
penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah pengujian secara simultan (uji F) dan parsial (uji T) serta koefisien Determinasi berganda (R^2) dan uji asumsi klasik. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah di Provinsi Bali berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat investasi dan PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran.

3. Ferry (2012) pada skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendapatan retribusi obyek wisata di 35 kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah dan Menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan retribusi objek wisata di 35 kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini dicapai dengan metode Model analisis yang digunakan adalah panel data dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) model, dengan menggunakan data *time series* selama lima tahun (2006-2010) dan data *cross section* sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel jumlah obyek pariwisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1



Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti.

Penulis dalam menguraikan landasan berfikir penelitian ini berlandaskan Al-quran dan hadish sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam.

Berdasarkan skema kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa penelitian ini ingin melihat pengaruh variabel jumlah hotel, jumlah rstoran dan jumlah wisatawan sebagai variabel indevenden (X) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel devenden (Y).

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁴¹ Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori maka hipotesisnya adalah :

1. Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur

Perhotelan memiliki peran sebagai penggerak pembangunan daerah, perlu dikembangkan secara baik dan optimal. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, PAD, penyerapan tenaga kerja, serta perluasan usaha. Hotel juga merupakan salah

⁴¹ Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 51

satu jenis usaha yang menyiapkan pelayanan jasa bagi masyarakat dan wisatawan. Selain itu pajak hotel juga akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Lia (2013) menemukan bahwa jumlah hotel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat dari penelitian di atas maka hipotesis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 = Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur

2. Pengaruh Jumlah Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur

Menurut Sukirno, menyatakan aliran pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan yang utama. Hal ini berarti kontribusi dari pajak restoran dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya PAD

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Lia (2013) menemukan bahwa jumlah restoran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat dari penelitian di atas maka hipotesis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 = Jumlah Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur

3. Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ada beberapa manfaat jika banyaknya kunjungan wisatawan mengunjungi tujuan wisata tertentu, salah satunya melalui penerimaan berbagai retribusi dan pajak yang disetorkan kepada daerah setempat. Pengaruh langsung kunjungan wisatawan terhadap pendapatan dan perekonomian. Karena, semakin lama wisatawan tinggal disuatu tempat tujuan wisata tersebut maka berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada pada tujuan daerah wisata. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisata suatu daerah tujuan wisata, maka pendapatan sektor pariwisata disuatu daerah tersebut juga akan semakin meningkat

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devilian Fitri (2014) dan Ferry (2012) menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat dari penelitian di atas maka hipotesis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 = Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2012)
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Aries Djainuri, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, (Bogor: Gailia Indonesia, 2012),
- Arikunto, S, *Metodelogi Penelitian : Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)
- Bahar, Ujang. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Pt Indeks, 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013)
- Drs. Darwin., MBP, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010)
- Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: ANDI, 2001)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- I Gede Pitana, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: ANDI, 2005)
- Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit-UNDIP, 2013)

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012)

M. Liga Suryadana, *Sosiologi Pariwisata: Kajian Kepariwisata Dalam Paradigma Interaktif/ Transformatif/ Menuju Wisata Spiritual* , (Bandung: Humaniora, 2015)

Moh. Prabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)

Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012)

Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012)

Singgih Santoso, *Menguasai SPSS 22 From Basic To Expert Skills* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015)

Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: PT. Tarsito, 2011)

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)